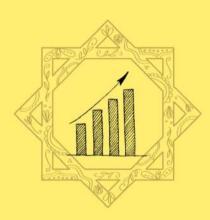


## PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional







Penerbit

UM Purwokerto Press (Anggota APPTI)
JI. KH. Ahmad Dahlan, PO Box 202, Purwokerto 53182 Jawa Tengah, Indonesia
Telepon: (0281) 636751; Ext. 474, Fax: (0281) 637239

E-mail : ump.press@gmail.com Website : www.lpip.ump.ac.id

## PROSIDING SEMINAR NASIONAL

### Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

"Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional"

Kamis, 26 Dzulhijjah 1442 H./5 Agustus 2021 M. Via Zoom Meeting Jl. KH. Ahmad Dahlan PO BOX 202, Purwokerto 53182 Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah



# PROSIDING SEMINAR NASIONAL PERAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Kamis, 26 Dzulhijjah 1442 H./5 Agustus 2021 M. Via Zoom Meeting

Cetaka pertama: Desember 2021 vi+172

hlm, 20,5x29 cm

Pengarah : Dr. Makhful, M.Ag. Penanggung Jawab : Makhrus, S.EI., M.SI. Panita Pelaksana : Istianah, Lc., M.Hum

Sekretaris : Safitri Mukarromah, S.Ag., M.Sy. Bendahara : Nurul Wahidah Uswati, A.Md.

Sie. Humas : Dr. Wage, M.Ag. Koord. Prosiding : Makhrus, S.EI., M,SI. Konsumsi : Hiknoventri, SH.

Sie. IT dan publikasi : Yogi Dwi Nugraha, S.Kom.

Pembantu umum : M. Darusman

Irwan Anggar Sagita

Streering Committee : Dr. Makhful, M.Ag.

Safitri Mukarromah, S.Ag., M.Sy.

Reviewer : Safitri Mukarromah, S.Ag., M.Sy.

Istianah, Lc., M.Hum

Editor : Makhrus, S.EI., M.SI.

Penerbit:

#### **UM Purwokerto Press (Anggota APPTI)**

Jl. KH. Ahmad Dahlan, PO Box 202, Purwokerto 53182 Jawa Tengah, Indonesia

Telepon : (0281) 636751; Ext. 474, Fax: (0281) 637239

E-mail : <u>ump.press@gmail.com</u>
Website : <u>www.lpip.ump.ac.id</u>

#### KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirahim Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Tumbuh kembangnya industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Perkembangan tersebut setidaknya dipengaruhi beragam faktor, baik dari segi prospek dan bentuk bisnis, kesadaran masyarakat terhadap jasa keuangan syariah, lembaga pendidikan yang mendirikan prodi dan konsentrasi mengenai ekonomi syariah, dan lainnya. Selain itu, adanya industri keuangan syariah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, haruslah menjadi industri keuangan yang dapat berpihak pada mereka yang lemah (kaum mustadh'afin). Mereka yang masih mengalami ketertindasan dan ekploitasi ekonomi sehingga menjadi manusia yang produktif. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia selama memasuki tiga dekade terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tumbuh dan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah dan bisnis berbasis syariah, seperti: perbankan syariah, asuransi syariah, baitul maal wat tamwil (BMT), pasar modal syariah, reksadana syariah, lembaga amil zakat, badan amil zakat nasional dan sebagainya. Sehingga, pertumbuhan lembaga keuangan syariah tersebut diatas juga diikuti perkembangan bisnis berbasis syariah termasuk diantaranya hotel syariah, salon syariah dan berbagai bisnis yang berbasis syariah lainnya.

Berkaitan dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang tumbuh semakin pesat tersebut diatas dapat terlihat dengan bertambahnya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan lembaga keuangan syariah lainnya. Sementara disisi lain, keberadaan kebutuhan hakim di Pengadilan Agama juga memiliki peranan penting ujung tombak proses mengenai sengketa ekonomi syariah. Pertumbuhan perkembangan lembaga keuangan syariah semakin menunjukkan peran dan kontribusinya dalam melakukan pengelolaan dana masyarakat melalui dana pihak ketiga. Maka, untuk terus memperbesar pertumbuhan aset dan lembaga keuangan syariah tersebut perlu dilakukan varian produk dan bagi hasil yang kompetitif, sehingga dapat bersama-sama memberikan kesejahteraan terhadap lembaga (perusahaan) dan masyarakat (nasabah). Namun, yang harus diperhatikan dalam mengeluarkan varian produk, tentu saja perusahaan membutuhkan sumber daya insani yang tidak hanya kompeten dalam pengelolaan dana lembaga, namun harus diimbangi dengan pemahaman aspek normatif syariah dan ekonomi positif, sehingga produk yang dihasilkan tidak terjadi pertentangan dengan syariah Islam, disamping memiliki nilai bisnis ekonomis yang sangat kompetitif.

Perkembangan industri keuangan syariah tersebut diatas, tentu saja memiliki beragam problematika, khususnya terkait masalah berbagai masalah operasional yang berada di masing-masing lembaga keuangan syariah tersebut. Misalnya, terjadinya perselisihan atau sengketa antara pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah. Maka, cara-cara penyelesaian sengketa tersebut haru harus diselesaikan secara bijak, konstruktif dan memberi jalan solusi kepada kedua belah pihak. Oleh sebab itu, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga otoritas yang mengawasi lembaga keuangan harus diberikan peran aktif dalam mengawasi operasional di masing-masing lembaga. Selain itu, keberadaan Pengadilan Agama yang mendapatkan mandat untuk menjadi mediasi penyelesaian sengketa terkait lembaga keuangan syariah harus diberikan wewenang yang luas dalam memberikan keputusan objetif dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan sengketa yang dihadapi lembaga keuangan syariah. Seminar nasional dilaksanakan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengkaji mengenai peran hukum ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi nasional. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, pemakalah, dan panitia kegiatan seminar Prodi HES UMP tahun ini.

Wassalamuala'ikum Wr.Wh

Safitri Mukarromah, S.Ag., M.Sy. Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

### **DAFTAR ISI**

Makalah Utama Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Nasional Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M	1
Dimensi Etik dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Perannya Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional <b>Prof. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.</b>	8
Ekosistem Industri Halal Dr. Encep Saepudin, M.Si.	15
Makalah Pendamping Pandangan Bisnis Syariah Terhadap Perkembangan Financial Technology (Study Kasus Fitur Serbu Seru dalam Aplikasi Bukalapak) Annas Syams Rizal Fahmi, Devid Frastiawan Amir Sup, Muhammad Irkham Firdaus, Fadhila Sukur Indra, Meitria Cahyani	18
Tingkat Risiko Pembiayaan Bermasalah dalam Akad <i>Murabahah bil Wakalah</i> Terhadap Eksistensi di Bank Syariah Indonesia <b>Desi Ayu Anita, Makhrus</b>	24
Problematika Bank Islam di Daerah Minoritas Muslim Kawin Malung, Makhrus	30
Pandangan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah yang Dipergunakan untuk Kepentingan Umum Lidia Fathaniyah, Istianah, Wage, Encep Saepudin	39
Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT Buana Mas Arcawinangun pada Masa Pandemi Covid-19 <b>Lukman Maulana, Safitri Mukarromah</b>	45
Pendampingan Pengelolaan Keuangan Sekolah Melalui Peningkatan Pemahaman Literasi Keuangan Syariah <b>Makhrus, Safitri Mukarromah, Makhful</b>	53
Peran Majelis Agama Islam Thailand Dalam Penerbitan Sertifikat <i>Halal Food</i> di Thailand <b>Poramint Chaikong, Safitri Mukarromah</b>	60
Sistem Pengupahan Karyawan di Salon Salma Spa Muslimah Purwokerto <b>Restina Musfirotun, Safitri Mukarromah</b>	70
Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayur Kol dengan Sistem <i>Jizaf</i> <b>Rizkian Hidavat. Wage</b>	77